



**KPKNL**  
SURAKARTA

# LAPORAN KINERJA 2023



## NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

<i>INTEGRITAS</i>	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
<i>PROFESIONALISME</i>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
<i>SINERGI</i>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
<i>PELAYANAN</i>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
<i>KESEMPURNAAN</i>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## DAFTAR ISI

<b>Nilai-Nilai Kementerian Keuangan .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	2
C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia.....	3
D. Aspek Strategis .....	6
E. Sistematika Laporan .....	8
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi Anggaran .....	30
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
▪ LAMPIRAN 1    : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	
▪ LAMPIRAN 2    : PERJANJIAN KINERJA	

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 202 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Surakarta dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Surakarta secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan alat kendali serta berfungsi sebagai *feedback* untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menetapkan visi untuk tahun 2020-2024 adalah *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Visi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. RKT Tahun 2023 berfungsi sebagai rencana kerja operasional dan kuantitatif yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Bahwa KPKNL Surakarta pada Tahun Anggaran 2023 sedang berusaha untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

yang telah diraih KPKNL Surakarta pada tahun 2019. Sebagai predikat tertinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPKNL Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi demi tercapainya predikat tersebut. Tetapi untuk tahun 2023 ini KPKNL Surakarta belum berhasil meraih predikat tersebut.

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja tahun 2023, KPKNL Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,92%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 15 (lima belas) IKU hijau, dan 4 (empat) IKU Kuning. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Surakarta sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Surakarta tahun 2023 dan menjadi tolok ukur kegiatan di tahun berikutnya. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kami sampaikan terima kasih juga kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPKNL Surakarta yang telah memberikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami akan menerima dan mempertimbangkan saran/usulan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tahun berikutnya.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Mohamad Lukman Saleh



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Target dan Realisasi

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2023 merupakan ikhtisar Capaian Kinerja KPKNL Surakarta selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian kinerja selama tahun 2023 pada KPKNL Surakarta, sehingga laporan ini dapat berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Misi DJKN.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surakarta tahun 2023, telah ditetapkan 10 (sebelas) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2023.

Capaian kinerja 20 (dua puluh) yang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang.	80%
<b>Customer Perspective(20%)</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang.	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
		2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	86%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
3.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.	3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).	100%
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.	4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan StandarKebutuhan (SBSK).	68%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan.	100%

		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).	100%
5.	Penerapan tata kelola lelang yang efektif.	5a-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.	86%
		5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.	94%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.	6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.	70
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				
7.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.	7a-CP	Indeks Integritas.	88,67
		7b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP.	100 (Level 4)
		7c-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.	60
8.	Organisasi yang <i>Fit to Purpose</i> .	8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.	100
		8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.	80
9.	SDM yang Kompeten.	9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai.	100%
10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.	100 (95,5)
		10b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.	100%

Selanjutnya Sasaran dan IKU tersebut diadendum pada tanggal 27 September 2023. Adapun Adendum atas sasaran Strategis dan IKU dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Nama Sasaran Strategis
2. Perubahan Nama IKU
3. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis
4. Penghapusan IKU
5. Perubahan Trajectory IKU

Sehingga sasaran strategis dan IKU menjadi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			31,46%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			104,85%

1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	95,53%	95,53%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	105,00%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
	Customer Perspective (20%)			20,46%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			102,28%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	84,56%	84,56%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	125,73%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			28,59%
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			116,28%
3a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	100,00%	116,28%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			108,56%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	69,68%	102,47%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	123,81%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	101,30%	101,30%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			112,61%
5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	75%	121,41%	120,00%
5b-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,13%	105,46%
5c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98,01%	113,97%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00	85,23	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)			28,53%
7	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif			120,00%
7a-Cp	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	94,13	120,00%
8	Organisasi yang Fit For Purpose			105,00%
8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	90	90,00%
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,05	120,00%

9	SDM yang Kompeten			120,00%
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	120,00%	120,00%
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			109,73%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,45	99,45%
10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	137,08%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>108,92%</b>

## B. Langkah-langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif ke depan yang harus dilakukan oleh KPKNL Surakarta untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024 mendatang, antara lain adalah:

1. Terus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
2. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang, serta sosialisasi piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, tata cara penyerahan dan pengurusannya;
4. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
5. Mengintensifkan upaya pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang untuk meningkatkan produktivitas lelang;
6. Sosialisasi layanan permohonan lelang online kepada *stakeholders* lelang;
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penilai melalui diklat maupun *knowledge sharing* untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
8. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada seksi-seksi/unit lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal;
10. Terkait dengan upaya pencapaian WBBM, KPKNL Surakarta pada tahun 2024 akan melakukan monev atas pencapaian predikat WBK yang telah diraih pada tahun 2018 sekaligus persiapan pembangunan ZI-WBBM pada tahun selanjutnya.

11. Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPKNL Surakarta yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

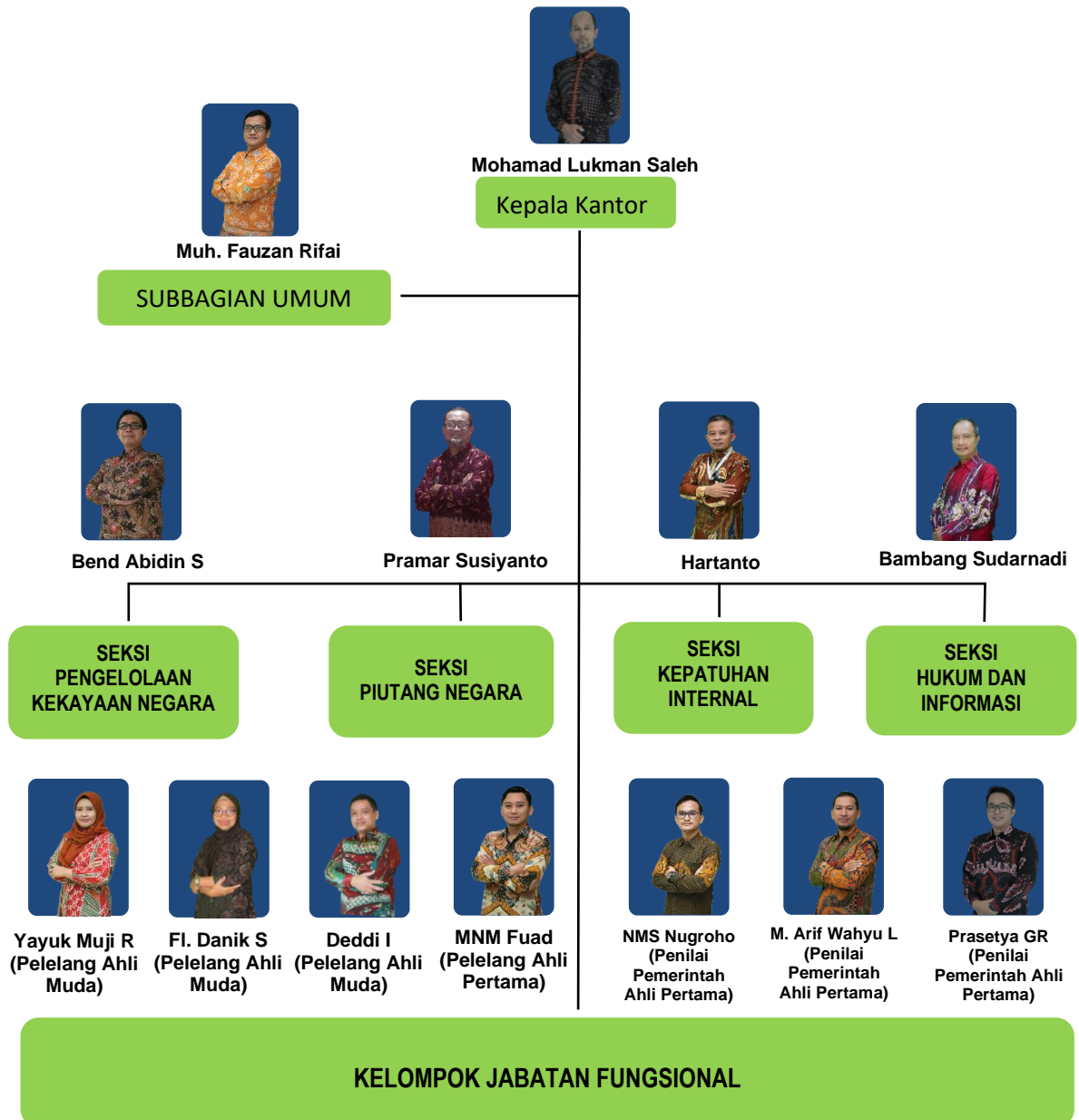
Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari :



### C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

#### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang cukup representatif dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor

141 Sumber, Surakarta. Selain itu, KPKNL Surakarta juga memiliki tanah seluas 1.043 m<sup>2</sup> yang berasal dari penyerahan KPPN Surakarta berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara yang pada tahun 2018 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya Gang Blewah XIII, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Adapun prasarana yang ada antara lain adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan roda 2	5	4	-	1
2	Kendaraan roda 4	5	4	-	1
3	Komputer dan laptop	71	52	4	15
4	Perangkat Pendukung Komputer	48	34	11	3

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 45 (empat puluh enam) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dan keahlian dengan sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut :

### Komposisi SDM berdasar Kepangkatan

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	IV	1	-	-		1	1	1	4
2	III	-	11	7	5	7	2	6	38
3	II	-	2	-	-	-	-	1	6
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		1	13	7	5	8	3	8	44

### Komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	Laki-laki	1	9	5	3	5	2	5	30
2	Perempuan	-	4	2	2	3	1	2	14
	Jumlah	1	13	7	5	8	3	7	44

### Komposisi SDM berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	S-2	-	-	3	-	3	-	2	8
2	D-IV/ S-1	1	3	2	5	3	2	5	21
3	D-III	-	5	2	-	2	-	-	9
4	D-I	-	2	-	-	-	1	-	3
5	SLTA	-	3	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	1	13	7	5	8	3	7	44

### Komposisi SDM berdasar Usia

No	Usia	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jml
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	18 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
2	31 - 40	-	7	5	3	3	1	4	23
3	41 - 50	-	4	2	2	3	2	3	16
4	Diatas 50	1	2	-	-	2	-	-	5
	Jumlah	1	13	7	5	8	3	7	44

### Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi

	Umum	PKN	PN	HI	KI	Jml
<b>Eselon III</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Eselon IV</b>	1	1	1	1	1	5
<b>Pelaksana</b>	12	6	4	7	2	31
<b>Jumlah</b>	13	7	5	8	3	37

#### D. Aspek Strategis

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan merupakan implementasi sekaligus antisipasi dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi. Pada cetak biru transformasi kelembagaan tersebut, aspek strategis DJKN meliputi inisiatif strategis dalam fungsi perbendaharaan dan fungsi *special mission*. Fungsi perbendaharaan atau fungsi pengelolaan kekayaan Negara meliputi kegiatan penilaian, inventarisasi dan pengelolaan kekayaan Negara. Sedangkan *special mission* merujuk pada fungsi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai instrumen investasi pemerintah. Pada level KPKNL, aspek strategis dalam fungsi perbendaharaan lebih berperan. Aspek strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Surakarta sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Surakarta mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen penerbitan SUKUK. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro yang masih merasakan dampak Covid19. Titik berat kegiatan pengelolaan kekayaan Negara adalah memberikan kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih

dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

## 2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

## 3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Surakarta antara lain sebagai berikut:

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
- Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- Kementerian Perindustrian (Ditjen. Industri Kecil dan Menengah) Cq. LPT-Indak Propinsi Jawa Tengah
- LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi Dan UMKM
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
- Pusat Pelayanan Teknologi - Badan Riset dan Inovasi Nasional
- RSUD dr. Moewardi Surakarta
- RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta
- Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta  
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten

## 4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Surakarta di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stake holder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi maupun non eksekusi sebagai sarana jual

beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surakarta sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Surakarta memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Surakarta juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

#### **E. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Surakarta tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab IV. Penutup

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menentukan arah kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

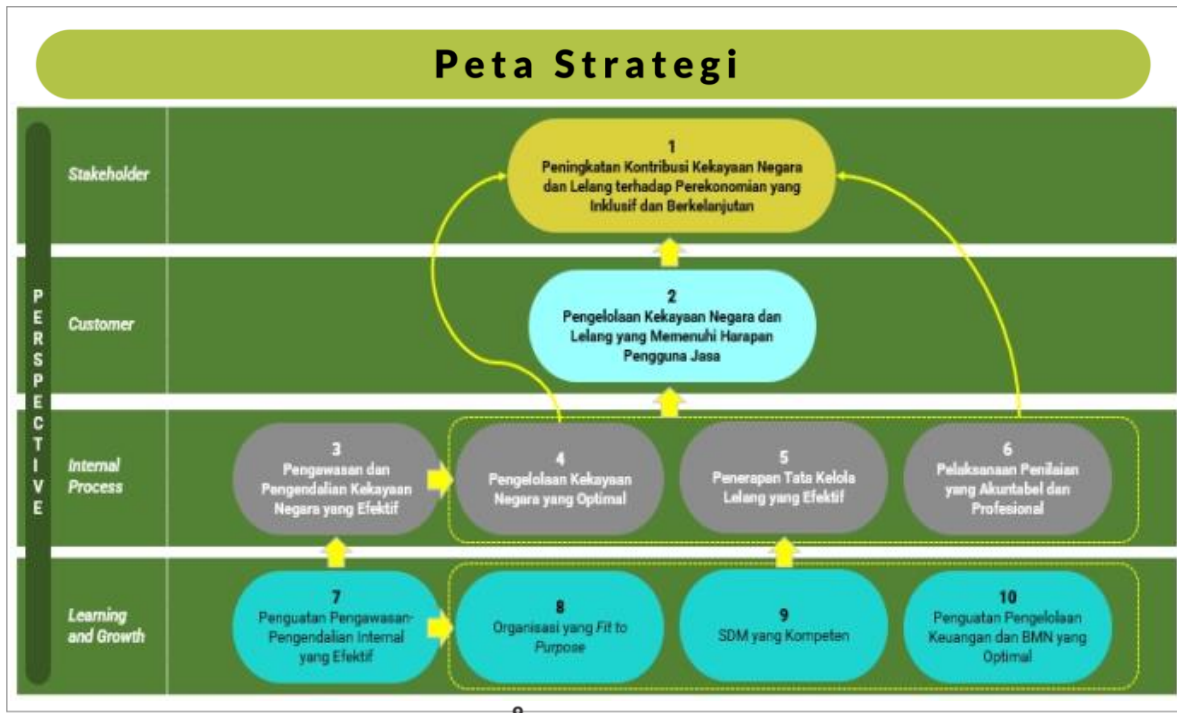
Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**, maka ditetapkanlah misi KPKNL Surakarta sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
3. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.
4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
5. Penerapan tata kelola lelang yang efektif.
6. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
7. Penguatan pengawasan- pengendalian internal yang efektif.
8. Organisasi yang Fit to Purpose.
9. SDM yang Kompeten.
10. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

## Peta Strategi KPKNL Surakarta Tahun 2023



Peta strategi KPKNL menetapkan 4 perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*.
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari *customer*/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan.
3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2023 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Surakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## SASARAN STRATEGIS DAN IKU

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang.	80%
<b>Customer Perspective(20%)</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang.	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
		2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	86%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
3.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.	3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).	100%
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.	4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).	68%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan.	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).	100%
5.	Penerapan tata kelola lelang yang efektif.	5a-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.	86%
		5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.	94%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.	6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.	70
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				
7.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.	7a-CP	Indeks Integritas.	88,67
		7b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP.	100 (Level 4)
		7c-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.	60
8.	Organisasi yang <i>Fit to Purpose</i> .	8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.	100
		8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.	80
9.	SDM yang Kompeten.	9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai.	100%

10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.	100 (95,5)
		10b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.	100%

Selanjutnya Sasaran dan IKU tersebut diadendum pada tanggal 27 September 2023. Adapun Sasaran Strategis dan IKU yang diadendum yaitu sebagai berikut:

### 1. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

### 2. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

### 3. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
<i>Learning and growth perspective</i>		<i>Stakeholder perspective</i>	
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
7a-CP	Indeks Integritas	1c-CP	Indeks Integritas
<i>Customer perspective</i>		<i>Internal process perspective</i>	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.
2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	3a-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
<i>Internal Process Perspective</i>		<i>Internal Process Perspective</i>	
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

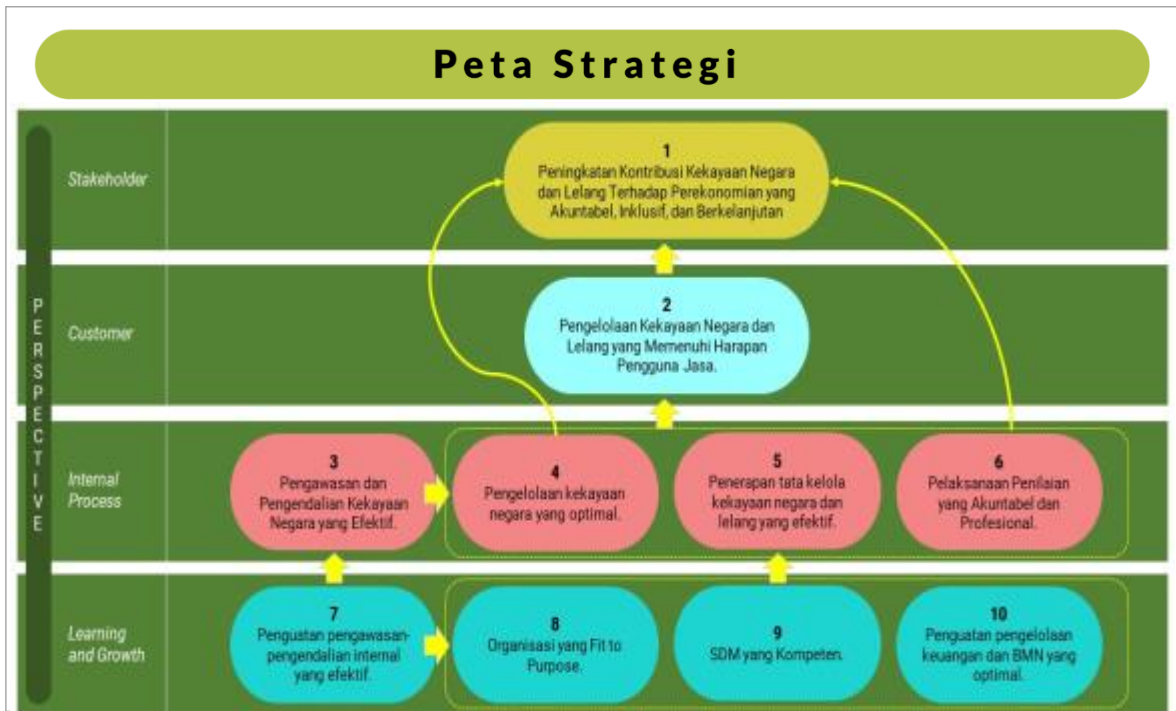
#### 4. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	
7b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Surakarta PK-02/WKN.09/2023

#### 5. Perubahan Trajectory IKU

Sebelum					Menjadi						
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100
10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Sehingga peta strategi setelah adendum yaitu sebagai berikut:



Sedangkan sasaran strategis dan IKU menjadi 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang.	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67
<b>Customer Perspective(20%)</b>				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
3.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.	3a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
5.	Penerapan tata kelola lelang yang efektif.	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	75%
		5b-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%
		5c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.	6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				
7.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.	7a-Cp	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60
8.	Organisasi yang <i>Fit to Purpose</i> .	8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
		8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
9.	SDM yang Kompeten.	9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%
10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

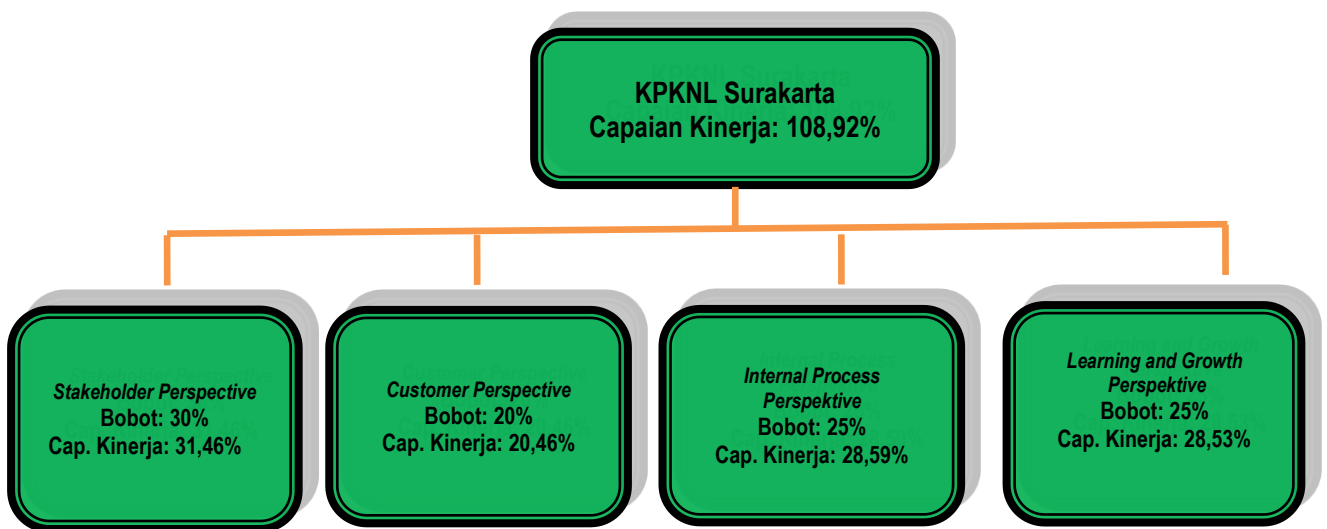
Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana tersebut di atas, pembagian anggaran untuk program/kegiatan pada KPKNL Surakarta yaitu sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp362.953.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.981.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp356.972.000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp2.277.492.000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 90.400.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.139.174.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 42.926.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp4.992.000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surakarta tahun 2023 adalah 108,92%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sebagaimana telah disebutkan pada BAB II, sesuai dengan addendum pada tahun 2023, KPKNL Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023, 15 (lima belas) IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi  $\geq$  100%), dan 4 (empat) IKU berstatus kuning dengan rincian sebagai berikut:

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)			31,46%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			104,85%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	95,53%	95,53%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	105,00%	120,00%

1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
	Customer Perspective (20%)			20,46%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			102,28%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	84,56%	84,56%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	125,73%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			28,59%
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			116,28%
3a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	100,00%	116,28%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			108,56%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	69,68%	102,47%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	123,81%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	101,30%	101,30%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			112,61%
5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	75%	121,41%	120,00%
5b-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,13%	105,46%
5c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98,01%	113,97%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00	85,23	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)			28,53%
7	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif			120,00%
7a-Cp	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	94,13	120,00%
8	Organisasi yang Fit For Purpose			105,00%
8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	90	90,00%
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,05	120,00%

9	SDM yang Kompeten			120,00%
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	120,00%	120,00%
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			109,73%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,45	99,45%
10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	137,08%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>108,92%</b>

Penjelasan atas capaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2023, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara yang optimal :

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian/Realisasi	
	(%)	(RpJuta)	(%)	(RpJuta)
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Rp22.637.600.000	95,53%	Rp21.624.687.460,00

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Realisasi Pokok Lelang	80%	105%	131,25%

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%

#### 1.a. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	21.61%	38.92%	38.92%	66,58%	66,58%	95,53%	95,53%	
Capaian	216.14%	129.75%	129.75%	111,09%	111,09%	95,53%	95,53%	

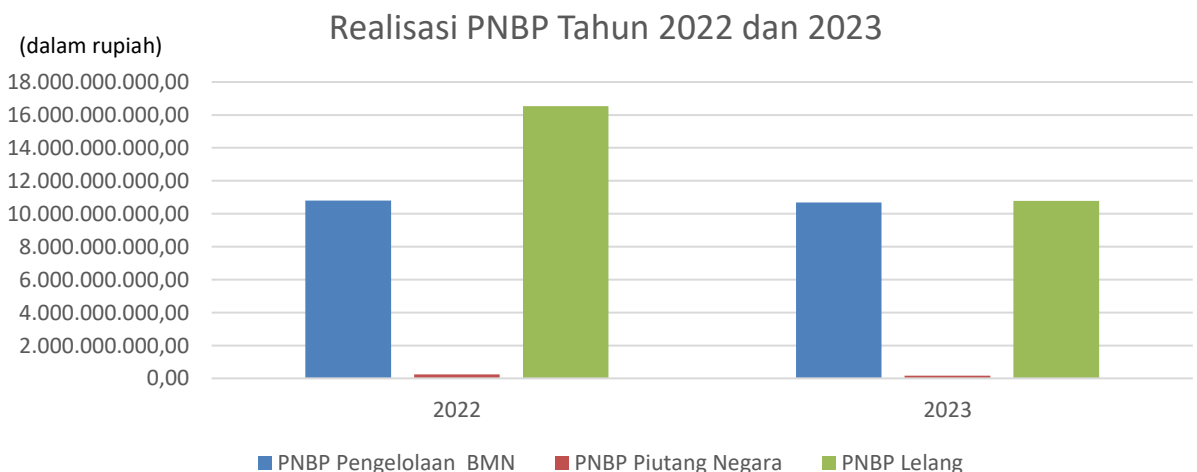
Kegiatan penghasil PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PNBP Pengelolaan BMN	7.997.600.000	10.692.277.613,00	134%
PNBP Piutang Negara	40.000.000	153.774.218,00	384%
PNBP Lelang	14.600.000.000	10.778.633.606,00	74%

Tercapainya target PNBP Pengelolaan BMN sebesar 134% adalah sebagian besar berasal dari pemanfaatan berupa sewa Rp 5.578.658.016,- , pemindahtanganan penghapusan Rp 4.846.022.196,- dan Rampasan Rp267.597.401,-.

PNBP Piutang Negara sebesar 384 % adanya pembayaran/pelunasan piutang Negara, serta adanya program crash program keringanan hutang.

PNBP Lelang yaitu 113% berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (termasuk uang jaminan pembeli wanprestasi) dan Bea Lelang Pegadaian.

IKU REALISASI PNBP		2022	2023	SELISIH
a.	PNBP Pengelolaan BMN	10.808.793.246,00	10.692.277.613,00	-116.515.633,00
b.	PNBP Piutang Negara	249.501.765,00	153.774.218,00	-95.727.547,00
c.	PNBP Lelang	16.540.143.688,00	10.778.633.606,00	-5.761.510.082,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.598.438.699,00</b>	<b>21.624.687.460,00</b>	<b>-5.973.753.262,00</b>



Realisasi IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang berupa PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar penerimaan sebesar - Rp5.973.753.262,00.

### 1.b. Persentase produktivitas lelang

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat pelaksanaan lelang laku dari total frekuensi lelang, adalah sesuai tabel berikut:

Nama Sasaran Strategis : 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
Nama IKU : 1b-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	30%	45%	45%	63%	63%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	54.47%	67.86%	67.86%	81,61%	81,61%	105%	105%	
Capaian	181.57%	150.80%	150.80%	129,54%	129,54%	131,25%	131,25%	

Frekuensi lelang sepanjang tahun 2023 pada KPKNL Surakarta sebanyak 1.614 kali, dengan total lelang yang laku sebanyak 429 kali. Formula Realisasi produktifitas lelang dapat dijabarkan sesuai tabel berikut:

Kanwil/KPKNL	Indeks Laku Lot Lelang per Jenis Lelang [A]					Realisasi Frek. Lelang [B]			Nilai Produktivitas		
	Persentase Lot Lelang Laku				NILAI [A] (Max 105%)	Target Frek. Lelang	Realisasi Frek. Lelang	NILAI [B] (Max 105%)	Target	Realisasi [A] x 40% + [B] x 60%	% Capaian
	Sukarela	Wajib	Eksekusi Ps 6 UUHT	Eksekusi Lainnya							
KPKNL Surakarta	94.78%	85.59%	10.33%	28.92%	105.00%	1,492	1,614	105.00%	80.00%	105.00%	131.25%

### 1.c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Pendekatan persepsi dilakukan SPI (Survey Penilaian Integritas) terhadap ASN dengan Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.

IKU Indeks Integritas merupakan IKU dengan target tahunan dengan target sebesar 88,67, dan realisasi di Tahun 2023 sebesar 89,17%.

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

## Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Prepresentasi Realisasi Pokok Lelang	100%	84.56%	84.56%

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Realisasi Tingkat Penurunan outstanding piutang negara	100%	127,74%	127,74%

### 2.a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi IKU ini berasal dari pokok lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Pegadaian di wilayah KPKNL Surakarta pada tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	16.68%	34.86%	34.86%	55,44%	55,44%	84,56%	84,56%	
Capaian	83.38%	87.16%	87.16%	79,21%	79,21%	84,56%	84,56%	

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp361.700.000.000,00, sedangkan Realisasi IKU tersebut sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp305.851.339.836,00 yang terdiri dari:

- Rp 235.261.823.636 (Pelelang KPKNL)
- Rp 70.589.516.200 (Pegadaian)

Sehingga realisasi hasil lelang KPKNL Surakarta sebesar **84,56 %** dari target.

Pokok lelang Pelelang Kelas I berasal dari pelaksanaan lelang Eksekusi Kepailitan, Eksekusi Hak Tanggungan dan Penetapan Pengadilan, Penghapusan BMN dan lelang Kayu Perhutani.

### Pokok Lelang KPKNL Surakarta dan Pegadaian

#### TAHUN 2021 – 2023

TAHUN		2021	2022	2023
a.	PL I KPKNL	231.775.144.747	349.925.144.898	235.261.823.636
b.	PL II dan Pegadaian	89.179.606.200	66.145.960.700	70.589.516.200
<b>JUMLAH</b>		<b>320.954.750.947</b>	<b>416.071.105.59</b>	<b>305.851.339.836</b>



Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Surakarta untuk tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, tetapi masih sedikit lebih tinggi daripada tahun 2021. Pencapaian tahun 2023 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 karena banyak lelang dengan hasil TAP (Tidak Ada Penawaran), Pemohon Lelang/Bank membatalkan lelang karena terdapat pelunasan oleh debitur, Sedangkan untuk pokok lelang yang berasal dari pegadaian relatif stabil kenaikannya maupun penurunan tiap tahun.

## 2.b. Realisasi Tingkat Penurunan outstanding piutang negara

Realisasi IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara diperoleh dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara, dengan hasil sebagai berikut:

Outstanding BKPN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penurunan outstanding piutang negara	*Rp3.872.000.000,00	Rp4.868.083.692	125,73%

\*Target Adendum

Tercapainya target Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 125,73% berasal BKPN yang berhasil diselesaikan s.d. 31-12-2023 sejumlah 233 BKPN. Target Tingkat Outstanding Piutang Negara Tahun 2023 sebesar Rp3.872.000.000,00 (target addendum). Capaian target berasal dari PSBDT, Pelunasan dan pembayaran angsuran.

Bahwa dalam pengurusan piutang Negara, KPKNL Surakarta telah berupaya untuk melakukan Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara. Pasca Pandemi COVID-9 Pengurusan Piutang Negara dilakukan penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa serta dengan mengirimkan surat penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada PH/PjH, juga dilakukan pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang kepada Penanggung Hutang dan / atau Penjamin Hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat, selain itu juga penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi kepada debitur melalui surat dan media lainnya untuk menagih pembayaran angsuran / pelunasan hutang.

## Sasaran Strategis 3: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU,. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	100%	116.28%

## 3.a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang tahun 2023	-	116	
2	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	-	116	
<b>Capaian IKU</b>		<b>86 %</b>	100%	116.28%

Target tahun 2023 sebesar 86%. Capaian Tahun 2023 sebesar 100% yang berarti seluruh persetujuan yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta telah ditindaklanjuti semuanya oleh Satker Kementerian/lembaga.

#### **Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 4 (empat) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	69,68%	102,47%
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	123,81%	120,00%
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	113,48%	101,30%

##### **4.a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	69,68%	102,47%

KPKNL Surakarta	Nama Sasaran Strategis : 4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	

Realisasi	-	56.67%	56.67%	62,33%	62,33%	69,68%	69,68%	Max/TLK
Capaian	-	113.34%	113.34%	113,33%	113,33%	102,47%	102,47%	

Target tahun 2023 sebanyak 327 NUP satker Non Kemenkeu lingkungan KPKNL Surakarta untuk pengukuran SBSK serta 544 NUP satker Non Kemenkeu untuk optimalisasi dan penggunaan SBSK.

Tahun 2023, KPKNL Surakarta telah menyelesaikan pengukuran terhadap 327 NUP untuk pengukuran dan 544 NUP untuk optimalisasi BMN.

#### 4b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah pada kementerian dan lembaga Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	123.81%	120.00%

Target tahun 2023 sebanyak 546 NUP (1.683 bidang) s.d Q4 KPKNL telah menyelesaikan 676 NUP (123.81%) dari target sertifikasi.

#### 4.c Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara terhadap BKPN yang masih menjadi Outstanding KPKNL Surakarta, Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	230	233	101,30%

Target penyelesaian BKPN untuk Tahun 2023 sebesar 230 BKPN, sedangkan realisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 233 BKPN (101,30%) yang berasal dari PSBDT sejumlah 142 BKPN dan lunas sejumlah 81 BKPN.

### Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU, dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	75%	121,41%	120,00%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,13%	105,46%
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98,01%	113,97%

### 5.a Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

IKU ini berasal dari kegiatan pemanfaatan BMN untuk Fortofolio pada kementerian dan Lembaga sesuai tabel berikut:

Uraian	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN	75%	121,41%	120.00%

No.	Uraian	Target (NUP)	Realisasi (NUP)
1	Pengukuran dan Rekomendasi	51	57
2	Tindak lanjut satker	5	8
	Jumlah	56	65

Target Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 56 NUP, dengan capaian tahun 2023 sebanyak 65 NUP.

### 5.b. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Target e-Auction adalah sebesar 94% dari frekuensi lelang. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, dari **1.614** frekuensi lelang, telah dilaksanakan *e-auction* sejumlah **1.600** kali, dan lelang konvensional sejumlah 14 frekuensi, sehingga realisasi triwulan IV sebesar **99,13%**. Lelang konvensional berasal dari lelang kayu, karena belum memungkinkan secara teknis untuk dilaksanakan secara e-auction mengingat jumlah Lot nya yang besar.

Uraian	Target	Realisasi	%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99,13%	105,46

## Sasaran Strategis 6: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	85,23%	120,00%

Kegiatan yang diukur adalah jumlah permohonan penilaian selesai yaitu jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Rata-rata indeks ketepatan waktu yang diperoleh sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 85,23.

### **Sasaran Strategis 7: Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	94,13	120.00%

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian merupakan IKU dengan target tahunan dengan target sebesar 60. Hasil Penilaian pada kertas Kerja Penilaian Efektivitas UKI, berupa 11 (sebelas) unsur penilaian yaitu:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Hasil perhitungan dari kertas kerja yang disusun dan telah direviu oleh Kanwil diperoleh nilai sebesar 94,13.

## Sasaran Strategis 8: Organisasi yang *Fit For Purpose*

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	90	90,00%
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,05	120,00%

### 8.a. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Bahwa tahun 2023, KPKNL Surakarta mengikuti penilaian sebagai Kantor yang berpredikat WBBM, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	90	90,00%

Target nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM sebesar 100 yang berarti untuk mencapai target tersebut, KPKNL Surakarta harus mendapatkan predikat ZI-WBBM pada tahun 2023.

KPKNL Surakarta belum mendapatkan predikat ZI WBBM di Tahun ini dikarenakan alasan non fraud, sehingga capaian sebesar 90 sesuai dengan Manual IKU.

### 8.b. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Target nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2023 sebesar 75. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97.05	120%

Review Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen

diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Kertas Kerja atas Reviu Pengelolaan Kinerja dan Risiko dilakukan penilaian oleh kanwil dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 97.05 satuan indeks.

### **Sasaran Strategis 9: SDM yang kompeten**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU,. Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	100%	120%

IKU ini adalah dalam rangka pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh KPKNL Surakarta. Dari 45 pegawai pelaksana yang sudah memenuhi standar kompetensi adalah sejumlah 45 (semua sudah memenuhi).

### **Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,45	99,45%
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	137,08%	120,00%

#### **10.a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,45	99,45%

IKU ini mengukur kualitas dalam pengelolaan anggaran yaitu kesesuaian dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Beberapa kegiatan yang diukur pada IKU ini adalah Capaian Belanja, tingkat efisiensi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belanja, penyelesaian tagihan belanja dan data kontrak. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Surakarta cukup baik dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) dihitung berdasarkan pada 50% x nilai IKPA pada aplikasi OM SPAN dan 50% x nilai Dashboard SMART DJA periode sampai dengan bulan Desember 2023 dengan hasil akhir yaitu sebesar 95,07 sehingga Capaian Realisasi IKU IKKPA adalah sebesar 99,45.

Tidak tercapainya target atas IKU tersebut disebabkan oleh:

- Tingkat efisiensi anggaran kurang.
- RPD tidak dilaksanakan sesuai rencana.

#### 11.b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2023 sebesar 100%. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	137,08%	120,00%

IKU diukur dari 2 komponen yaitu persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan periode s.d. Desember 2023 sebesar 137,08%.

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan diantaranya dengan:

- Implementasi penggunaan aplikasi yang terkait dengan laporan keuangan dan barang contohnya SIMAN V2, SIRUP, E-TENDERING, E-PURCHASING, dll
- Optimalisasi capaian pada aspek pengadaan dhi. Penggunaan aplikasi SIMPeL, LPSE, dan SIUK-PBJ.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, KPKNL Surakarta mendapatkan anggaran total sebesar Rp2.640.445.000. Anggaran tersebut seluruhnya terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.831.014.000,00, belanja modal sebesar Rp 609.717.000,00, dan belanja pegawai sebesar Rp0,00 karena untuk belanja pegawai sudah tersentralisasi di Kantor Pusat DJKN.

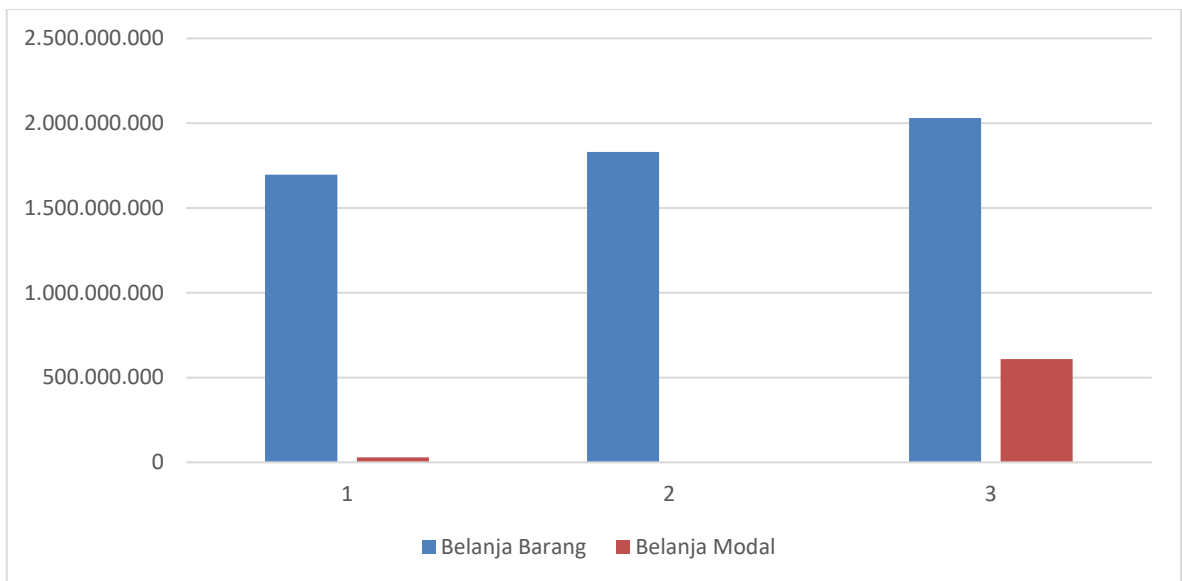
Realisasi anggaran tahun 2023 dapat dijelaskan sesuai table berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja pegawai	0	0	0%

Belanja barang	2.030.728.000	1.909.603.449	94,03%
Belanja modal	609.717.000	567.073.426	93,00%
Jumlah Anggaran	2.640.445.000	2.476.676.875	93,79%

### Perbandingan Anggaran KPKNL Surakarta Tahun 2021 s.d. 2023

TAHUN		2021	2022	2023
a.	Belanja Pegawai	-	-	-
b.	Belanja Barang	1,695,675,000.00	1.831.014.000,00	2.030.728.000
c.	Belanja Modal	29,740,000.00	-	609.717.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1,725,415,000.00</b>	<b>1.831.014.000,00</b>	<b>2.640.445.000</b>



Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, bahwa untuk tahun 2023 ini mengalami kenaikan anggaran dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Kenaikan signifikan pada Belanja Modal dikarenakan adanya renovasi rumah dinas KPKNL Surakarta, Pembelian mesin dan peralatan kantor, dan pembelian kendaraan roda 2.

## **BAB IV PENUTUP**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai KPKNL Surakarta tahun 2023 ini adalah sebesar **108,92%**. Capaian NKO ini merupakan hasil kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Surakarta yang berasal dari dari total 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), 15 (lima belas) IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi  $\geq 100\%$ ), dan 4 (empat) IKU berstatus kuning.

1. IKU yang memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (hijau) sebanyak 15 (lima belas) IKU, yaitu:
  - a. Persentase produktivitas lelang
  - b. Indeks Integritas
  - c. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
  - d. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
  - e. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
  - f. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
  - g. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
  - h. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)
  - i. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
  - j. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online
  - k. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
  - l. Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif
  - m. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
  - n. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
  - o. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
2. IKU yang memperoleh hasil  $> 80\%$  dan  $< 100\%$  (kuning) sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu
  - a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
  - b. Persentase Realisasi Pokok Lelang
  - c. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM
  - d. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan Negara
  - a. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satker K/L dalam pengelolaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;

- b. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
  - c. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan penguasaan peraturan pengelolaan BMN melalui kegiatan *capacity building*, diklat teknis, maupun kegiatan lainnya.
2. Pengurusan piutang Negara
- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
  - b. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
3. Pelayanan lelang
- a. Mengintensifkan pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang;
  - b. Meningkatkan kapasitas para Pelelang secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai peraturan/ketentuan lelang;
  - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelelang secara intensif.
  - d. Sosialisasi layanan permohonan lelang *online*.
  - e. Penggalan Potensi lelang UMKM.
4. Pelayanan penilaian
- a. Melakukan *knowledge sharing* dan diskusi internal tentang penilaian untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
  - b. Diklat penyegaran tentang penilaian.
5. Bagian Umum
- a. Asistensi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada Seksi lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
  - b. Konsultasi pengelolaan DIPA dengan Kanwil Perbendaharaan dan/atau KPPN.
6. Kepatuhan Internal
- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal.
  - b. Terkait dengan upaya pencapaian WBBM, KPKNL Surakarta pada tahun 2024 akan melakukan monev atas pencapaian predikat WBK yang telah diraih pada tahun 2018 sekaligus persiapan pembangunan ZI-WBBM pada tahun selanjutnya.
7. Hukum dan Informasi
- Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tugas fungsi KPKNL Surakarta kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat menjadi cermin dan evaluasi serta diharapkan memacu kinerja organisasi yang lebih baik, dan secara eksternal Laporan Kinerja ini menjadi indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap *stakeholders*. Harapannya adalah masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari eksistensi dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surakarta.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**PERIODE S.D. DESEMBER 2023**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>							31,46%	
1	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan</b>							104,85%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	95,53%	14%	30%	95,53%	95,53%	kuning
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	105,00%	14%	30%	131,25%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	<b>Customer Perspective (20%)</b>							20,46%	
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							102,28%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	84,56%	14%	50%	84,56%	84,56%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	125,73%	14%	50%	125,73%	120,00%	hijau
	<b>Internal Process Perspective (25%)</b>							28,59%	
3	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>							116,28%	
3a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/L	86%	100,00%	19%	100%	116,28%	116,28%	hijau
4	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>							108,56%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	69,68%	19%	37%	102,47%	102,47%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	123,81%	19%	37%	123,81%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	101,30%	14%	27%	101,30%	101,30%	hijau
5	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif</b>							112,61%	
5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	75%	121,41%	11%	28%	161,88%	120,00%	hijau
5b-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	99,13%	14%	36%	105,46%	105,46%	hijau
5c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	P/M	86%	98,01%	14%	36%	113,97%	113,97%	hijau
6	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							120,00%	
6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	E/M	70,00	85,23	21%	100%	121,76%	120,00%	hijau
	<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>							28,42%	
7	<b>Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif</b>							120,00%	
7a-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	P/M	60	94,13	14%	100%	156,88%	120,00%	hijau
8	<b>Organisasi yang Fit For Purpose</b>							105,00%	
8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	90	14%	50%	90,00%	90,00%	kuning
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	97,05	14%	50%	121,31%	120,00%	hijau
9	<b>SDM yang Kompeten</b>							120,00%	
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	75%	120,00%	14%	100%	160,00%	120,00%	hijau
10	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>							109,73%	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	99,45	14%	50%	99,45%	99,45%	kuning
10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	137,08%	14%	50%	137,08%	120,00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>108,92%</b>	<b>hijau</b>

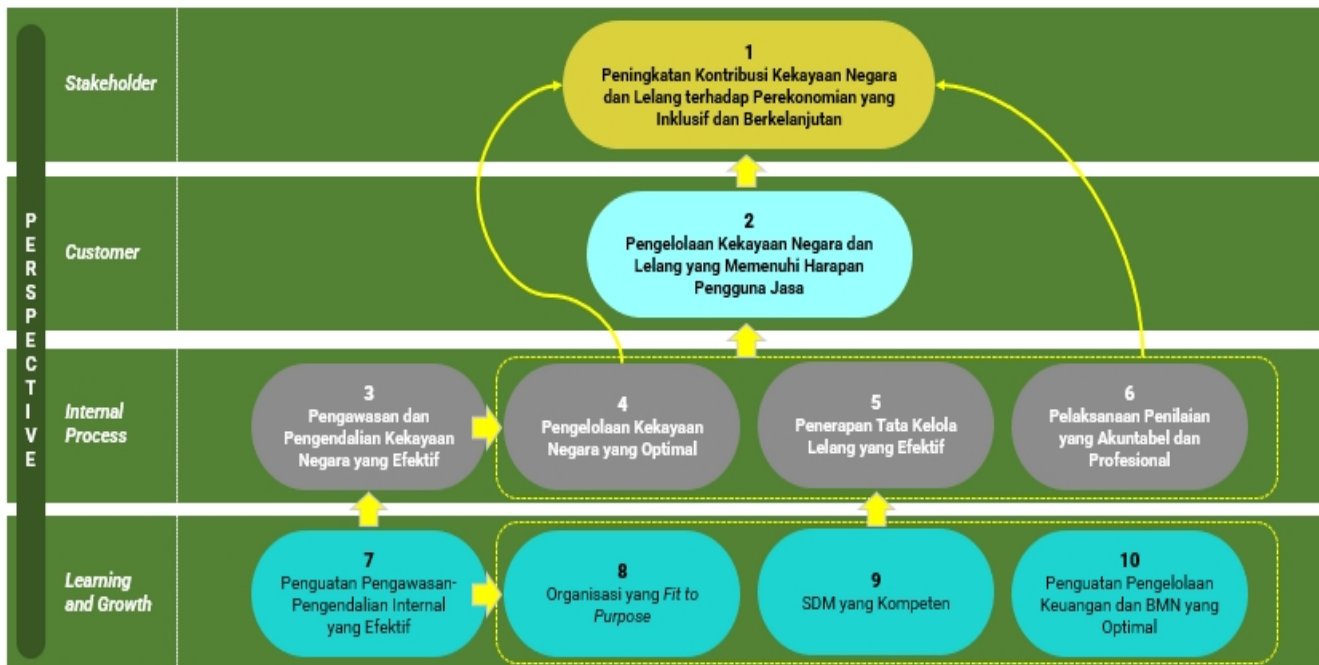


**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-02/WKN.09/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG SURAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**Peta Strategi**

**VISI DJKN**

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang.	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang.	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
		2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	86%
3.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.	3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).	100%
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.	4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).	68%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan.	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).	100%
5.	Penerapan tata kelola lelang yang efektif.	5a-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.	86%
		5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.	94%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.	6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.	70
7.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.	7a-CP	Indeks Integritas.	88,67
		7b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP.	100 (Level 4)
		7c-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.	60
8.	Organisasi yang Fit to Purpose.	8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.	100
		8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.	80
9.	SDM yang Kompeten.	9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai.	100%
10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.	100 (95,5)
		10b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.	100%

**Kegiatan**

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi
2. Pengelolaan Aset
1. Legislasi dan Litigasi

Rp	5.981.000
Rp	356.972.000
Rp	90.400.000



2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	2.139.174.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	42.926.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp	4.992.000

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mahmudsyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan</b>							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	86%	86%
3	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>							
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>							
4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	<b>Penerapan tata kelola lelang yang efektif</b>							
5a-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	60%	60%	86%	86%
5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
6	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
6a-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
7	<b>Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
7b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (level 4)	100 (level 4)
7c-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
8	<b>Organisasi yang Fit to Purpose</b>							
8a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
9	<b>SDM yang Kompeten</b>							
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)
10b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo





**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan			
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			
					Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-	

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adi Wibowo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adi Wibowo, S.E., M.M.	NAMA	Mahmudsyah	
NIP	197503261995031001	NIP	196407161991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
		Persentase produktivitas lelang	80	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi Pokok Lelang.	100	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan



		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86	Penerima Layanan
3.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)	100	Proses Bisnis
4.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	68	Proses Bisnis
		Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	Proses Bisnis
5.	Penerapan tata kelola lelang yang efektif	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Proses Bisnis
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
7.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran



8.	Organisasi yang Fit to Purpose	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	SDM yang Kompeten	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyoal kebenaran guna menjaga nama baik institusi</p>



PERILAKU KERJA	
	dan negara.
3	<p>Kompeten</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <p>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</p> <p>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</p>
6	<p>Adaptif</p> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>





## PERILAKU KERJA

7

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama



Pegawa

Ditandatangani secara elektronik  
Adi Wibowo  
197503261995031001

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, harkat dan kewajiban.



Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik  
Mahmudsyah  
196407161991031001





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	46 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target							Y
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4		
1	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100	100
3	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	80	80	80
4	Persentase realisasi Pokok Lelang.	20	40	40	70	70	100	100	100
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100	100
6	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN						86	86	86
7	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100	100



8	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	50	50	55	55	68	68
9	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	40	40	60	60	100	100
10	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	30	30	60	60	100	100
11	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	40	40	60	60	86	86
12	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94
13	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70
14	Indeks Integritas					88,67	88,67
15	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP					100	100
16	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif					60	60
17	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.					100	100
18	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko					80	80
19	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	75	75	100	100





KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Ditinjau:



Ditandatangani secara elektronik

Adi Wibowo

197503261995031001

1 Januari 2023

Pejabat yang Bertugas:



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah

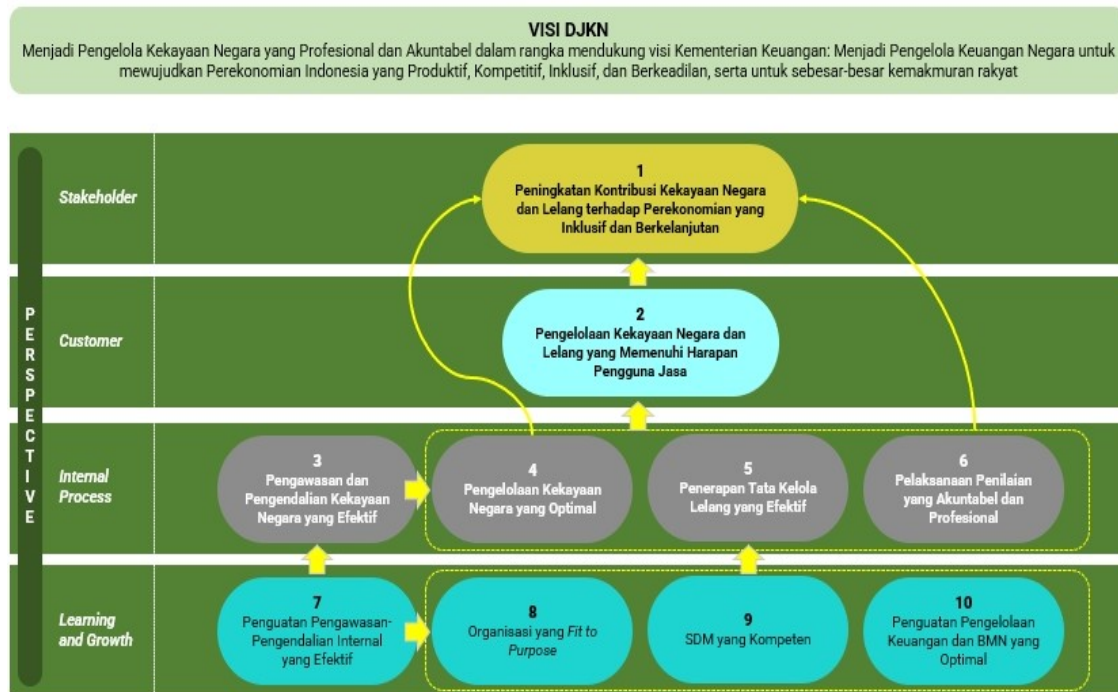
196407161991031001



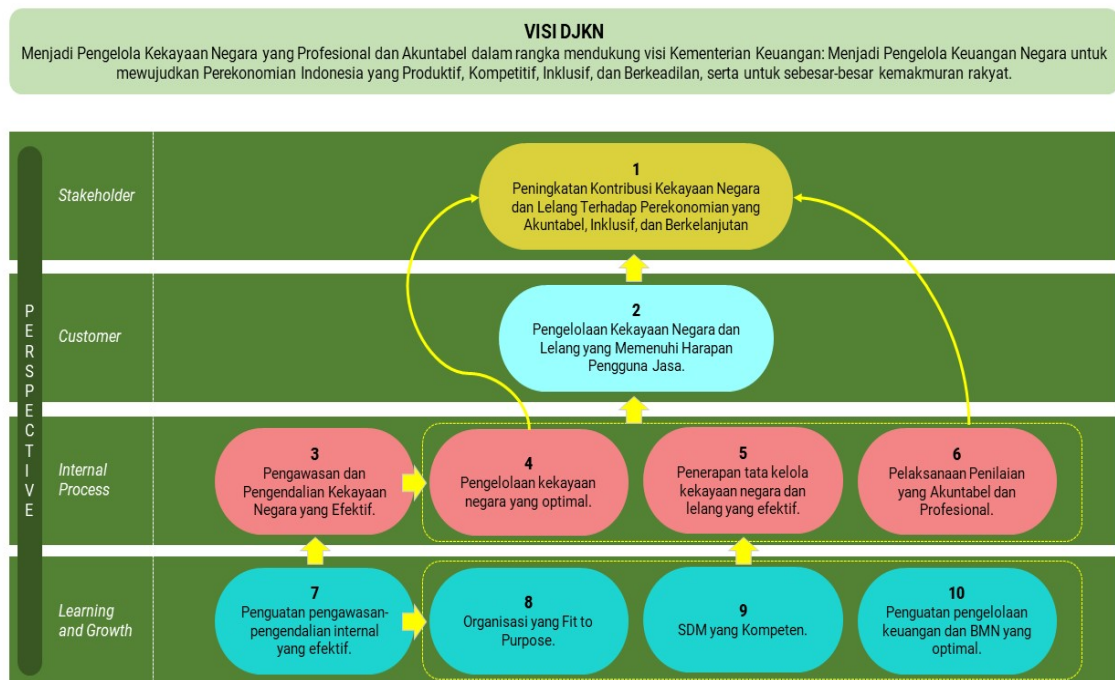
## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-02A/WKN.09/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-02/WKN.09/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Peta Strategis sebelum adendum:**



**Peta Strategis setelah adendum:**



### a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
Stakeholder perspective						Stakeholder perspective					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
5	Penerapan Tata Kelola Lelang yang Efektif					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				

### b. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

### c. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
7a-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
Customer perspective						Internal process perspective					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.				
2c-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	86%	86%	3a-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	86%	86%
Internal Process Perspective						Internal Process Perspective					
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

### d. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
7b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Surakarta PK-02/WKN.09/2023

#### e. Perubahan Trajectory IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100
10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100 %	100%	10b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100 %	100%

#### f. Perubahan Kode IKU

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
5a-N	5b-N	Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Convention Auction
5b-N	5c-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online
7c-CP	7a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Addendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Semarang, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang.	100%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	100%
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Perseetujuan Pengelolaan BMN.	86%
		Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset).	100%
5	Penerapan Tata Kelola Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.	94%
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.	86%
7	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Integritas	88.67
		Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
		Penguatan Internal/Anggaran	
		Penguatan Internal/Anggaran	
		Penguatan Internal/Anggaran	

Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%
		Indeks Integritas	88.67
		Penguatan Internal/Anggaran	
		Penguatan Internal/Anggaran	
		Penguatan Internal/Anggaran	

Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi Pokok Lelang.	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.	Penerima Layanan
3	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.	Penguatan Internal/Anggaran
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.	Penguatan Internal/Anggaran
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).	Penguatan Internal/Anggaran
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif.	Penguatan Internal/Anggaran

## B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	IKI	Sebelum				Menjadi					
		Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	-	86%	86%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
6	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	-	86%	86%
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	55%	55%	68%	68%	7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	55%	55%	68%	68%
8	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	8	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	60%	60%	100%	100%

Sebelum				Menjadi					
No	IKI	Target			No	IKI	Target		
		Q3	s.d.Q3	Q4			Y	Q3	s.d.Q3
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%
10	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	60%	60%	86%	10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	11	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	60%	60%	86%
12	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	12	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%
13	Indeks Integritas	-	-	88,67	13	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70
14	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100	14	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	-	-	60
15	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	-	-	60	15	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	100
16	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	100	16	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80
17	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	17	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	75%	100%
18	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	75%	100%	18	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	19	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	100%
20	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	85%	85%	100%	-	-	-	-	-

Penghapusan IKI

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	
7b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Surakarta PK-02/WKN.09/2023 karena menyesuaikan UPK di atasnya



Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  
Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Semarang, 27 September 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



# Pasti Iso!

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan,  
Integritas, Inovatif dan memberi SOLusi



## **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkono No. 141, Surakarta  
Kode Pos 57136, Telepon 0271-723644